



Laporan Kinerja

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023

Jember, 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Dinas Komunikasi dan Informatika. Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023.

Jember, 15 Januari 2024
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



BOBBY ARIE SANDY, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770307 199612 1 001

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA...	4
E. ISU STRATEGIS	7
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
A. RENCANA STRATEGIS	8
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	11
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	13
D. PERJANJIAN KINERJA	15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	17
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJATAHUN 2023	17
B. CAPAIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	18
C. REALISASI ANGGARAN	59
BAB IV. PENUTUP.	65
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD	
Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2023	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan

pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 12 tahun 2023 sebagai berikut :

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan di bidang Statistik dan urusan pemerintahan di bidang Persandian.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Komunikasi dan

Informatika, urusan pemerintahan di bidang Statistik dan urusan pemerintahan di bidang Persandian.

(4) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi

a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Jember, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Kabupaten Jember, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kabupaten Jember, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Kabupaten Jember, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat lingkup Kabupaten Jember;

b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Jember, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Kabupaten Jember, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kabupaten Jember, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi,

penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Kabupaten Jember, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat lingkup Kabupaten Jember;

c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

a. Sekretariat, terdiri atas :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional

b. Bidang Aspirasi dan Layanan Informasi Publik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

c. Bidang Layanan Media Komunikasi Publik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

d. Bidang Pengembangan Smart City dan Statistik, terdiri dari :

1. Seksi Statistik;
2. Kelompok Jabatan Fungsional

e. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

f. UPTD; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. SUMBER DAYA MANUSIA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari 28 ASN dan 23 Non ASN . Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Dinas Komunikasi dan Informatika:

Tabel 1.1
Jumlah ASN Dinas Komunikasi dan Informatika
berdasarkan Jabatan
periode Januari-Desember 2023

No	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Dinas	1	Struktural
2	Sekretaris	1	Struktural
3	Kepala Bidang Aspirasi dan Informasi Publik	1	Struktural
4	Kepala Bidang Layanan Media Komunikasi Publik	1	Struktural
5	Kepala Bidang Pengembangan Smartcity dan Statistik	1	Struktural
6	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Struktural
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	Struktural
8	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	1	Struktural
9	Kepala Seksi Statistik	1	Struktural
10	Pranata Komputer Ahli Muda	3	Fungsional
11	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	3	Fungsional
12	Pranata Komputer Ahli Pertama	3	Fungsional
13	Perencana Ahli Muda	1	Fungsional
14	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	1	Pelaksana
15	Pengelola Keuangan	1	Pelaksana
16	Analisis Konten Media Sosial	1	Pelaksana
17	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	1	Pelaksana
18	Pengadministrasian Program dan Kerjasama	1	Pelaksana
19	Pengadministrasian Analisis dan Kemitraan Media	1	Pelaksana
20	Pengadministrasian Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1	Pelaksana
21	Teknisi Produksi Multi Media dan Web	1	Pelaksana
22	Teknisi Jaringan Instalasi	1	Pelaksana
Jumlah		28	

Tabel 1.2
Jumlah ASN Dinas Komunikasi dan Informatika
berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang
periode Januari-Desember 2023

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2	Pembina Tingkat I	IV/b	-
3	Pembina	IV/a	2
4	Penata Tingkat I	III/d	10
5	Penata	III/c	3
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	-
7	Penata Muda	III/a	6
8	Pengatur Tingkat I	II/d	6
9	Pengatur	II/c	-
10	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-
11	Pengatur Muda	II/a	-
12	Juru Tingkat I	I/d	-
13	Juru	I/c	-
14	Juru Muda Tingkat I	I/b	-
	Jumlah		28

Tabel 1.3
Jumlah ASN dan Non ASN Dinas Komunikasi dan Informatika
berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
periode Januari-Desember 2023

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD	-	ASN
2	SLTP	-	ASN
3	SMA/STM	6	ASN
4	D3	1	ASN
5	S1	19	ASN
6	S2	2	ASN
7	SD	-	Non ASN
8	SLTP	1	Non ASN
9	SMA/STM	4	Non ASN
10	D3	5	Non ASN

11	S1	13	Non ASN
12	S2	-	Non ASN
Jumlah		51	

E. ISU STRATEGIS

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu:

1. Meningkatkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2. Pengelolaan Portal Satu Data
3. Fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pelayanan publik
4. Meningkatkan tata kelola serta infrastruktur terkait persandian dan keamanan informasi.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember , penyusunan Rencana Stategis Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke 2 (dua) dan tujuan ke 1 (satu) yaitu

- 1) Misi ke-2 : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara, eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya
- 2) Tujuan ke-1 : Meningkatkan tata keloa pemerintahan yang efektif melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik
- 3) Sasaran Strategis Kabupaten :
 - Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik.

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menegah dan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika

sebagaimana termuat didalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut :

**MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2021-2026**

Tujuan 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik

Indikator Tujuan : Nilai Indeks SPBE

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sebelum Perubahan							
Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Nilai Indeks SPBE	2,19	2,2				
Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data dan informasi statistik sektoral untuk perencanaan dan evaluasi	45,8	50				
Meningkatkan keamanan informasi dalam mendukung SPBE	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan keamanan informasi dalam pelayanan	2,7	11,1				
Sesudah Perubahan							

Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE	Nilai Indeks Domain Kebijakan SPBE			2,4	2,5	2,6	2,7
Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE			2,1	2,2	2,3	2,4
Meningkatkan penerapan manajemen SPBE	Nilai Indeks Domain Manajemen SPBE			1,5	1,8	2,1	2,4
Meningkatkan kualitas layanan SPBE	Nilai Indeks Domain Layanan SPBE			2,6	2,7	2,8	2,9

Sumber data : tabel 2.1 pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026

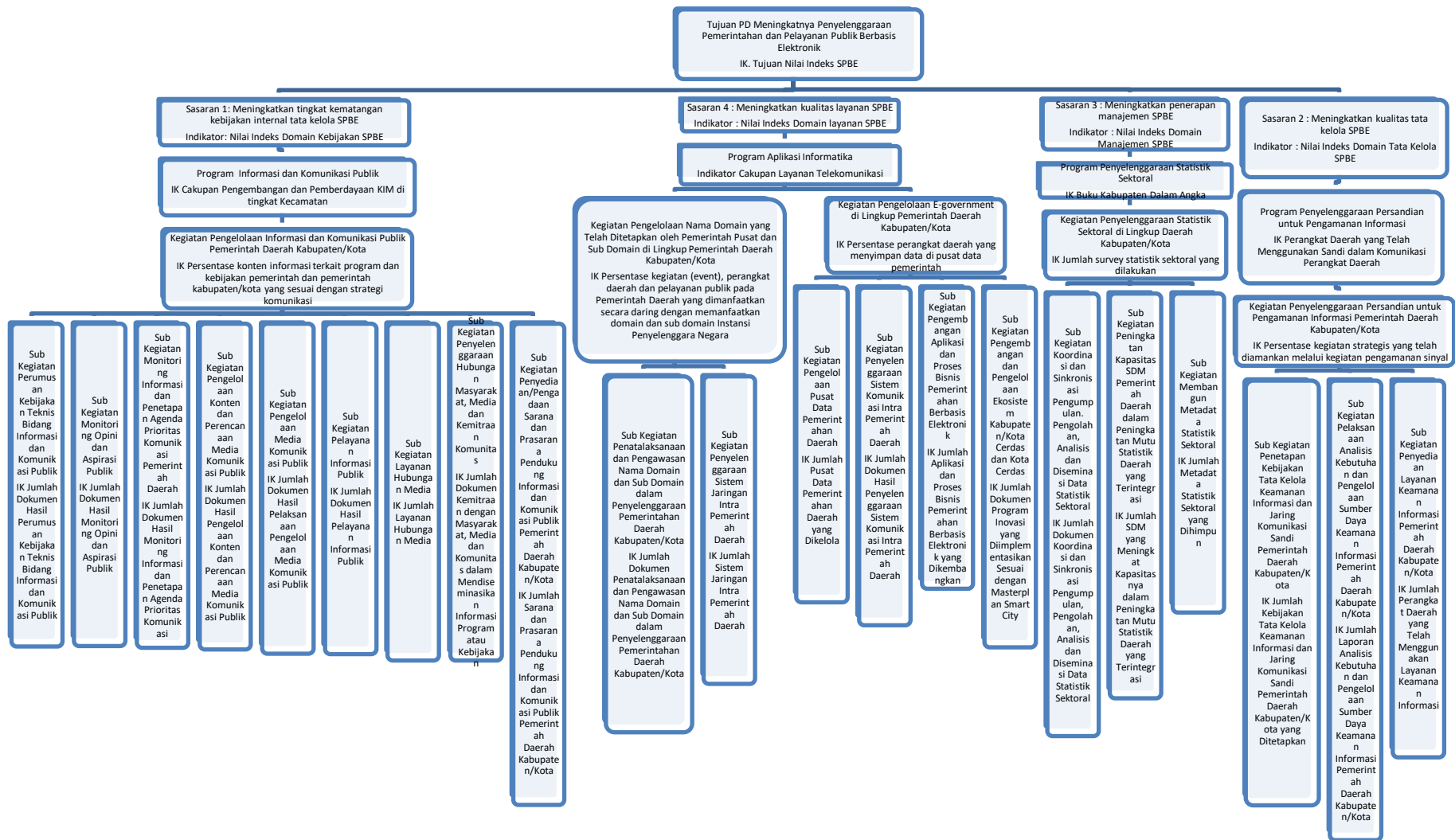
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember melalui berbagai program/ kegiatan/ sub kegiatan di tahun 2023.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen Perubahan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika. Melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

Cascading Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :



C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 065/128/35.09.323/2023 Tahun 2023;

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE	Nilai indeks domain kebijakan SPBE	<p>Nilai Indeks domain kebijakan SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB</p> <p>Penjelasan Sesuai Pedoman : Indikator evaluasi domain kebijakan SPBE sesuai PermenpanRB No. 59/2020</p> <p>Penjelasan Nilai Indeks domain kebijakan SPBE : Nilai indeks domain kebijakan SPBE merupakan nilai indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan kapabilitas proses.</p>	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh OPD
Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Nilai indeks domain tata kelola SPBE	<p>Nilai Indeks domain tata kelola SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB</p> <p>Penjelasan Sesuai Pedoman : Indikator evaluasi domain tata kelola SPBE sesuai</p>	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh OPD

		PermenpanRB No. 59/2020 Penjelasan Nilai Indeks SPBE : Nilai indeks domain tata kelola SPBE merupakan nilai indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan kapabilitas proses.		
Meningkatkan penerapan manajemen SPBE	Nilai indeks domain manajemen SPBE	Nilai Indeks domain manajemen SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB Penjelasan Sesuai Pedoman : Indikator evaluasi domain manajemen SPBE sesuai PermenpanRB No. 59/2020 Penjelasan Nilai Indeks SPBE : Nilai indeks domain manajemen SPBE merupakan nilai indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan kapabilitas proses.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh OPD
Meningkatkan kualitas layanan SPBE	Nilai indeks domain layanan SPBE	Nilai Indeks domain layanan SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB Penjelasan Sesuai Pedoman : Indikator evaluasi domain layanan SPBE sesuai PermenpanRB No. 59/2020	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh OPD

		<p>Penjelasan Nilai Indeks SPBE : Nilai indeks domain layanan SPBE merupakan nilai indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan kapabilitas layanan.</p>		
--	--	---	--	--

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indicator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir)

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023
1	Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE	Nilai indeks domain kebijakan SPBE	2,4
2	Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Nilai indeks domain tata kelola SPBE	2,1
3	Meningkatkan penerapan manajemen SPBE	Nilai indeks domain manajemen SPBE	1,5
4	Meningkatkan kualitas layanan SPBE	Nilai indeks domain layanan SPBE	2,6

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023 didukung dengan anggaran

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp6.167.291.208 (Enam Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah).
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sebesar Rp7.006.158.000 (Tujuh Milyar Enam Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika sebesar Rp10.023.789.375 (Sepuluh Milyar Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial sebesar Rp271.290.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi sebesar Rp152.356.000 (Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	➤ 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	➤ 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	➤ 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	➤ 60 - 70	Baik
5.	CC	➤ 50 - 60	Cukup (memadai)
6.	C	➤ 30 - 50	Kurang
7.	D	➤ 0 - 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.
3. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress positif***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau

semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress negative***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

B.1 ANALISA REALISASI KINERJA

Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026. Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 1 (satu) Tujuan, 4 (empat) sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2023

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata	Nilai indeks domain kebijakan SPBE	2,4	2,1	87,5

2	Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE		Nilai indeks domain tata kelola SPBE	2,1	2,2	104,7
3	Meningkatkan penerapan manajemen SPBE		Nilai indeks domain manajemen SPBE	1,5	1,73	115,3
4	Meningkatkan kualitas layanan SPBE		Nilai indeks domain layanan SPBE	2,6	3,19	122,6

Sumber Data: Keputusan MenpanRB No 13 Tahun 2024 (Laporan Hasil Evaluasi SPBE 2023)

Dari tabel diatas terlihat berdasarkan hasil evaluasi SPBE bahwa capaian 4 (empat) indikator sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika rata rata mencapai 107,525% dan masuk dalam kategori **AA Sangat Memuaskan**. Dengan demikian maka secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021 -2026.

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET			REALISASI		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE	Nilai indeks domain kebijakan SPBE	-	1,7	2,4	2,1	1,7	2,1
Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Nilai indeks domain tata kelola SPBE	-	1,5	2,1	1,4	1,5	2,2
Meningkatkan penerapan manajemen SPBE	Nilai indeks domain manajemen SPBE	-	1,18	1,5	1	1,18	1,73
Meningkatkan kualitas layanan SPBE	Nilai indeks domain layanan SPBE	-	2,6	2,6	2,57	2,63	3,19

Sumber Data: Keputusan MenpanRB No 13 Tahun 2024 (Laporan Hasil Evaluasi SPBE 2023)

Dari tabel 3.2 terlihat berdasarkan hasil evaluasi SPBE bahwa capaian 4 (empat) indikator sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE menunjukkan penurunan indeks pada tahun 2021 ke 2022, namun pada tahun 2023 mengalami kenaikan. Domain Kebijakan SPBE meliputi Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang terdiri dari 10 indikator tingkat kematangan yang target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga). Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE sudah dipenuhi namun ada 5 indikator berdasarkan hasil evaluasi dari KemenpanRB yang masih dibawah level minimum yaitu Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE, Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem

Penghubung Layanan Instansi, dimana belum adanya kebijakan internal yang mengatur secara komprehensif. Secara rinci hasil evaluasi SPBE oleh KemenpanRB tahun 2023 untuk sasaran meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE Pemerintah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

No	Indikator	Level
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	1
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	1
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3

2. Sasaran meningkatkan kualitas tata kelola SPBE dari tahun 2021 sampai dengan 2023 menunjukkan peningkatan hasil indeksnya. Domain tata kelola SPBE terdiri dari 3 aspek yaitu :
 - a. Perencanaan Strategis SPBE dengan 4 indikator tingkat kematangan yang target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga). Pada aspek perencanaan strategis SPBE memperoleh hasil evaluasi dengan 3 indikator masih dibawah nilai minimum, yaitu Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE dan Inovasi Proses Bisnis SPBE. Secara rinci hasil evaluasi SPBE oleh KemenpanRB tahun 2023 untuk sasaran

meningkatkan kualitas tata kelola SPBE pada aspek perencanaan strategis SPBE Pemerintah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Level
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	3
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2

- b. Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan 4 indikator tingkat kematangan yang target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga). Pada aspek teknologi informasi dan komunikasi memperoleh hasil evaluasi dengan 3 indikator masih dibawah nilai minimum, yaitu pembangunan aplikasi SPBE, Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah. Secara rinci hasil evaluasi SPBE oleh KemenpanRB tahun 2023 untuk sasaran meningkatkan kualitas tata kelola SPBE pada aspek teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Level
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1

- c. Penyelenggara SPBE dengan 2 indikator tingkat kematangan yang target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga). Pada aspek penyelenggara SPBE memperoleh hasil evaluasi dengan 2 indikator dengan nilai minimum. Secara rinci hasil evaluasi SPBE oleh KemenpanRB tahun 2023 untuk sasaran meningkatkan kualitas tata kelola SPBE pada aspek penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Level
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3

3. Sasaran meningkatkan penerapan manajemen SPBE dari tahun 2021 sampai dengan 2023 menunjukkan peningkatan hasil indeksnya. Domain penerapan manajemen SPBE terdiri dari 2 aspek yaitu :

- a. Penerapan Manajemen SPBE dengan 8 indikator tingkat kematangan yang target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga). Pada aspek perencanaan strategis SPBE memperoleh hasil evaluasi dengan 7 indikator masih dibawah nilai minimum, yaitu Manajemen Risiko SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Aset TIK, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan dan Manajemen Layanan SPBE. Secara rinci hasil evaluasi SPBE oleh KemenpanRB tahun 2023 untuk sasaran meningkatkan penerapan manajemen SPBE pada aspek penerapan manajemen SPBE Pemerintah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Level
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	3
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	2
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1

- b. Audit TIK dengan 3 indikator tingkat kematangan yang target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga). Pada aspek Audit TIK memperoleh hasil evaluasi dengan 2 indikator masih dibawah nilai minimum, yaitu Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE. Secara rinci hasil evaluasi SPBE oleh KemenpanRB tahun 2023 untuk

sasaran meningkatkan penerapan manajemen SPBE pada aspek Audit TIK Pemerintah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Level
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	2
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	2
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	3

4. Sasaran meningkatkan kualitas layanan SPBE dari tahun 2021 sampai dengan 2023 menunjukkan peningkatan hasil indeksnya. Domain Layanan SPBE terdiri dari 2 aspek yaitu :

a. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan 10 indikator tingkat kematangan yang target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga). Pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik memperoleh hasil evaluasi dengan 3 indikator masih dibawah nilai minimum, yaitu Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah. Secara rinci hasil evaluasi SPBE oleh KemenpanRB tahun 2023 untuk sasaran meningkatkan kualitas layanan SPBE pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Level
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	5
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	1
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	2
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	1
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4

b. Layanan Publik Berbasis Elektronik dengan 6 indikator tingkat kematangan yang target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga). Pada aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik memperoleh hasil evaluasi dengan 2 indikator masih dibawah nilai minimum, yaitu Layanan Data Terbuka dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Secara rinci hasil evaluasi SPBE oleh KemenpanRB tahun 2023 untuk sasaran meningkatkan kualitas layanan SPBE pada aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Level
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	1
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	2
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	4
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	4

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Kondisi Yang Harus Dicapai Pada Tahun 2026 berdasarkan target pada Rencana Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENSTRA 2026	REALISASI Th. 2023	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE	Nilai indeks domain kebijakan SPBE	2,7	2,1	77,77
2	Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Nilai indeks domain tata kelola SPBE	2,4	2,2	91,66

3	Meningkatkan penerapan manajemen SPBE	Nilai indeks domain manajemen SPBE	2,4	1,73	72,08
4	Meningkatkan kualitas layanan SPBE	Nilai indeks domain layanan SPBE	2,9	3,19	110

Sumber Data: Keputusan MenpanRB No 13 Tahun 2024 (Laporan Hasil Evaluasi SPBE 2023)

Dari tabel diatas terlihat berdasarkan hasil evaluasi SPBE bahwa realisasi capaian 4 (empat) indikator sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dibandingkan dengan target jangka menengah pada perubahan rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat 3 realisasi indikator yang kurang dari target yaitu

1. Nilai indeks domain kebijakan SPBE dengan capaian 77,77% dan masuk dalam kategori **Sangat Baik**.
2. Nilai indeks domain tata kelola SPBE dengan capaian 91,66% dan masuk dalam kategori **Sangat Memuaskan**.
3. Nilai indeks domain manajemen SPBE dengan capaian 72,08% dan masuk kategori **Sangat Baik**.

Sedangkan realisasi 1 indikator yaitu Nilai indeks domain layanan SPBE melebihi target dengan capaian 110% dan masuk dalam kategori **Sangat Memuaskan**.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2023	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE	Nilai indeks domain kebijakan SPBE	2,1	2,91	-0,81
2	Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Nilai indeks domain tata kelola SPBE	2,2	2,27	-0,07
3	Meningkatkan penerapan manajemen SPBE	Nilai indeks domain manajemen SPBE	1,73	1,65	0,08

4	Meningkatkan kualitas layanan SPBE	Nilai indeks domain layanan SPBE	3,19	3,45	-0,26
---	------------------------------------	----------------------------------	------	------	-------

Sumber Data: Keputusan MenpanRB No 13 Tahun 2024 (Laporan Hasil Evaluasi SPBE 2023)

Dari tabel diatas terlihat berdasarkan hasil evaluasi SPBE bahwa realisasi 4 (empat) indikator sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dibandingkan dengan realisasi nasional terdapat 3 realisasi indikator sasaran yang kurang dari realisasi nasional yaitu :

1. Indikator Nilai Indeks Domain Kebijakan SPBE kurang 0,81 dari realisasi nasional.
2. Indikator Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE kurang 0,07 dari realisasi nasional
3. Indikator Nilai Indeks Domain Layanan SPBE kurang 0,26 dari realisasi nasional.

Sedangkan 1 realisasi indikator sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika melebihi realisasi nasional, yaitu :

1. Indikator Nilai Indeks Domain Manajemen SPBE melebihi 0,08 dari realisasi nasional

Dari tabel 3.1 s/d 3.4, perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE

Capaian kinerja untuk sasaran strategis meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE dibanding tahun 2022 terdapat peningkatan sebesar 0,4 dengan capaian 123,5%. Namun capaian kinerja dibandingkan dengan target pada perubahan rencana strategis menghasilkan 87,5% yang berarti kurang dari target demikian juga apabila dibandingkan dengan realisasi nasional, untuk sasaran meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE kurang nilai 0,81.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE

Capaian kinerja untuk sasaran strategis meningkatkan kualitas tata kelola SPBE dibanding tahun 2022 terdapat peningkatan sebesar 0,7 dengan capaian 146,6%. Sedangkan capaian kinerja dibandingkan dengan target pada perubahan rencana strategis menghasilkan 104,7% yang berarti melebihi dari target namun apabila dibandingkan dengan realisasi nasional, untuk sasaran meningkatkan kualitas tata kelola SPBE kurang nilai 0,07.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan penerapan manajemen SPBE

Capaian kinerja untuk sasaran strategis meningkatkan penerapan manajemen SPBE dibanding tahun 2022 terdapat peningkatan sebesar 0,55 dengan capaian 146,6%. Sedangkan capaian kinerja dibandingkan dengan target pada perubahan rencana strategis menghasilkan 115,3% yang berarti melebihi dari target dan apabila dibandingkan dengan realisasi nasional, untuk sasaran meningkatkan penerapan manajemen SPBE melebihi 0,08.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan kualitas layanan SPBE

Capaian kinerja untuk sasaran strategis meningkatkan kualitas layanan SPBE dibanding tahun 2022 terdapat peningkatan sebesar 0,56 dengan capaian 121,29%. Sedangkan capaian kinerja dibandingkan dengan target pada perubahan rencana strategis menghasilkan 122,6% yang berarti melebihi dari target dan apabila dibandingkan dengan realisasi nasional, untuk sasaran meningkatkan kualitas layanan SPBE melebihi 0,26.

B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Table 3.5
Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2023

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Sasaran 1 Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE								
Indikator 1.1 Nilai indeks domain kebijakan SPBE	87,5		√					
Sasaran 2 Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE								
Indikator 2.1 Nilai indeks domain tata kelola SPBE	104,7	√						
Sasaran 3 Meningkatkan penerapan manajemen SPBE								
Indikator 3.1 Nilai indeks domain manajemen SPBE	115,3	√						
Sasaran 4 Meningkatkan								

n kualitas layanan SPBE								
Indikator 4.1 Nilai indeks domain layanan SPBE	122,6	√						

Dari tabel 3.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2023, secara umum realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kategori Sangat Memuaskan

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indicator kinerja adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE

Dari tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran meningkatnya tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE dengan 1 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat memuaskan yaitu mempunyai nilai capaian 87,5% kurang dari target capaian yang telah ditetapkan dalam perubahan rencana strategis. Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana ke depan adalah :

Pemerintah Kabupaten Jember belum memiliki Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah, sehingga belum terlihat ada kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Jember pada tahun 2023. Solusi perbaikan terhadap permasalahan ini, Dinas Komunikasi dan Informatika akan menyusun Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE

Dari tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran meningkatnya kualitas tata kelola SPBE dengan 1 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat sangat memuaskan yaitu mempunyai nilai capaian 104,7% melebihi dari target capaian yang telah ditetapkan dalam perubahan rencana strategis. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dalam indikator kinerja Nilai indeks domain tata kelola SPBE adalah :

1. Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Kabupaten Jember telah direviu dan dievaluasi secara periodik pada SIPPD.
2. Proses Pembangunan Aplikasi SPBE Pemkab Jember sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku.
3. Layanan Pusat Data di Pemerintah Kabupaten Jember sudah direviu dan dievaluasi secara berkala, hasil reviu dan evaluasi telah ditindaklanjuti dengan perbaikan terhadap layanan pusat data.
4. Layanan Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Jember sudah diterapkan di sebagian perangkat daerah dan di fasilitas pelayanan publik.
5. Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Jember sudah dibentuk sesuai SK Sekda Nomor: 188.4/136/SEKDA/1.12/2022.
6. Kolaborasi Penerapan SPBE antar unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Jember telah dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Jember.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana ke depan adalah :

1. Belum Optimalnya Penerapan Manajemen SPBE.
Solusi perbaikan terhadap permasalahan ini, Dinas Komunikasi dan Informatika akan menyusun Proses Bisnis SPBE serta penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE yang telah disusun.
2. Pemerintah Kabupaten Jember masih belum memiliki Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sehingga belum adanya kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Jember.

Solusi perbaikan terhadap permasalahan ini, Dinas Komunikasi dan Informatika akan meningkatkan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan menggunakan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah

3. Belum optimalnya Tim Koordinasi SPBE dan Kolaborasi Penerapan SPBE. Solusi perbaikan terhadap permasalahan ini, Dinas Komunikasi dan Informatika akan meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Jember.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan penerapan manajemen SPBE

Dari tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran meningkatkan penerapan manajemen SPBE dengan 1 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat sangat memuaskan yaitu mempunyai nilai capaian 115,3% melebihi dari target capaian yang telah ditetapkan dalam perubahan rencana strategis. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dalam indikator kinerja nilai indeks domain manajemen SPBE adalah :

1. Manajemen Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Jember telah diterapkan dengan dimanfaatkannya Sertifikat Elektronik.
2. Manajemen Data berupa pengelolaan data sudah dilaksanakan dan diterapkan di seluruh unit kerja serta sudah dievaluasi.
3. Manajemen Aset TIK di Pemerintah Kabupaten Jember sudah diterapkan serta hasil reuiu dan evaluasi dalam SIMDA BMD dijadikan pedoman dalam perbaikan manajemen Aset TIK.
4. Kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/317/1.12/2023 tentang Pedoman Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.
5. Pelaksanaan Audit Keamanan TIK di Pemerintah Kabupaten Jember sudah dilakukan oleh Tim dari BSSN, dan hasil audit berupa rekomendasi dari BSSN ditindaklanjuti dengan perbaikan penerapan keamanan informasi aplikasi.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana ke depan adalah :

1. Belum optimalnya penerapan manajemen SPBE pada Pemerintah Kabupaten Jember.

Solusi perbaikan terhadap permasalahan ini, Dinas Komunikasi dan Informatika akan meningkatkan penerapan manajemen Keamanan Informasi, penerapan manajemen data, penerapan manajemen aset TIK dan akan membuat kebijakan internal untuk mengatur secara komprehensif.

2. Belum optimalnya kekuatan dalam audit TIK SPBE pada Pemerintah Kabupaten Jember.

Solusi perbaikan terhadap permasalahan ini, Dinas Komunikasi dan Informatika akan berkoordinasi untuk pelaksanaan audit infrastruktur SPBE dan audit aplikasi SPBE serta menyusun kebijakan internalnya.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan kualitas layanan SPBE

Dari tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran meningkatkan kualitas layanan SPBE dengan 1 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat sangat memuaskan yaitu mempunyai nilai capaian 122,6% melebihi dari target capaian yang telah ditetapkan dalam perubahan rencana strategis. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dalam indikator kinerja nilai indeks layanan SPBE adalah :

1. Aspek Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2, Layanan Publik Sektor 3 menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE dalam Pemerintah Kabupaten Jember.
2. Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan yakni kebutuhan akan layanan kepegawaian yang terintegrasi , serta beradaptasi dengan peraturan perundangan dari pemerintah pusat yakni PerMENPAN RB Nomor 6 Tahun 2022 dalam bentuk aplikasi SKP berbasis elektronik dimana penilaian kinerja pegawai per triwulanan.

3. Layanan Kinerja berbasis elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu kebutuhan serta mengakomodir perubahan kinerja kepegawaian yang terbaru, dari segi data dan rekap laporan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana ke depan adalah :

1. Pemerintah Kabupaten Jember masih belum memiliki Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah.

Solusi perbaikan terhadap permasalahan ini, Dinas Komunikasi dan Informatika akan berkoordinasi untuk pelaksanaan Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah dan penyusunan kebijakan internalnya.

2. Pemerintah Kabupaten Jember masih belum memiliki Kebijakan Internal Layanan Data Terbuka dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Solusi perbaikan terhadap permasalahan ini, Dinas Komunikasi dan Informatika akan berkoordinasi untuk penyusunan kebijakan internal Layanan Data Terbuka dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember dalam upaya meningkatkan indeks SPBE adalah

- a. Telah membuat konsep Peraturan Bupati tentang Arsitektur SPBE
- b. Telah membuat konsep Peraturan Bupati tentang Peta Rencana SPBE
- c. Optimalisasi kinerja Tim Koordinasi SPBE
- d. Optimalisasi koordinasi dan kolaborasi seluruh perangkat daerah untuk memenuhi indicator evaluasi SPBE.

B.3 ANALISA PROGRAM – KEGIATAN - SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika. pada tahun 2023 didukung 4 (Empat) Program 5 (Lima) Kegiatan dan 6 (Enam) Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : Informasi dan Komunikasi Publik			
	Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : Pelayanan Informasi Publik			
	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp266.561.200	Rp225.600.000	84,63
	Output : Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	8 dokumen	8 dokumen	100
	Outcome : Jumlah dokumen pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang tersusun	1548 dokumen	830 dokumen	53,61

Sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik

Pada sub kegiatan ini kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 yaitu :

1. Monev PPID dan SP4N-Lapor!

Monitoring dan Evaluasi SP4N-Lapor! dilaksanakan Pada Bulan Februari dengan peserta seluruh Operator PPID Pelaksana, OPD, Kecamatan, Kelurahan, RSD dan BUMD. Monev dimaksudkan untuk menilai kinerja tahun 2022 dan sosialisasi untuk kegiatan PPID dan SP4N-Lapor! tahun 2023. Acara dilaksanakan di Aula PB Sudirman Sekretariat Pemerintah Kabupaten Jember



Sasaran Strategis 2: Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi			
	Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Keamanan Informasi			

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Input : Dana yang dibutuhkan	Rp146.192.000	Rp134.557.000	92,04
Output : Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan layanan keamanan informasi	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	100
Outcome : Laporan keamanan informasi yang tersusun	2 laporan	2 laporan	100

Sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2023 melaksanakan kegiatan :

1. Perpanjangan lisensi firewall untuk pengamanan terhadap server
2. Information Teknologi Security Assesment (ITSA) yang dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara. ITSA merupakan kegiatan BSSN yang memberikan layanan security assessment bagi system dan infrastruktur teknologi informasi pada instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah. Sistem Informasi yang dilakukan assesment pada tahun 2023 adalah :
 - a. sikeren.jemberkab.go.id
 - b. [e-kapeka,jemberkab.go.id](http://e-kapeka.jemberkab.go.id)
 - c. psc.jemberkab.go.id
 - d. portal-data.jemberkab.go.id



3. Monitoring dan Evaluasi penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Desa dan Kecamatan



Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Penerapan Manajemen SPBE

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral			
	Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang			

	Terintegrasi			
	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp119.220.000	Rp115.475.000	96,85
	Output : Jumlah SDM yang meningkatkan kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	400 orang	400 orang	100
	Outcome : Dokumen statistic sektoral yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	100

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah

Pada sub kegiatan ini kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 yaitu :

1. Bimbingan Teknis Diskominfo Siapkan Langkah Wujudkan Satu Data Kabupaten Jember. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Jember, Diskominfo Jember menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) input data di portal satu data kabupaten Jember bagi operator pengelola data sektoral pada Selasa, 31 Januari 2023 di Aula Timur Pemkab Jember. Bimtek tersebut sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan dan pengolahan data statistik yang tertuang dalam berita acara hasil verifikasi daftar data pada tahun 2023. Rapat dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember Bobby A. Sandy, dalam arahannya beliau menjelaskan bahwasannya Bimtek ini sebagai upaya untuk mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI). Dalam hal ini, Diskominfo sebagai wali data, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data, Bappeda sebagai Ketua Forum Koordinator SDI Kabupaten Jember dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data wajib bersinergi.



2. Rapat Koordinasi dan Sosialisasi SIPD E-Walidata untuk Menuju Satu Data Indonesia. Sebagai wujud dan upaya merealisasikan Satu Data Indonesia, Diskominfo Jember sebagai Walidata menggelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi SIPD E-Walidata pada Senin (20/2/2023) di Aula Hotel Rembangan. Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Hery Listiantoro. Dalam arahannya, Hery menuturkan sesuai dengan petunjuk Bupati Jember bahwasannya Satu Data Kabupaten Jember harus segera terealisasikan untuk mewujudkan satu kesatuan Satu Data Indonesia. Hal tersebut selaras dengan upaya yang dilakukan Diskominfo Jember dalam menggelar kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi data statistik sektoral dalam perwujudan satu data kabupaten Jember yang mulai bertahap dilaksanakan pada Selasa (13/12/2023) di Daffam Fortuna, dilanjutkan pada Selasa (27/12/2023) di Aula Bawah Pemkab Jember dan

Bimtek operator pada Selasa (31/1/2023) di Aula Bawah Pemkab.



3. Bimbingan Teknis Updating Data Sektorial Portal Satu Data Kabupaten Jember tahun 2023. Kegiatan Bimtek ini dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, bertempat di Aula PB Sudirman Pemkab Jember pada hari Jumat, 1 Desember 2023. Kegiatan Bimtek ini dihadiri oleh Operator dan PIC dari OPD di Lingkup Pemkab Jember. Kegiatan Updating Data ini untuk memenuhi data yang ada pada Portal Jember Satu Data.



4. Rapat Evaluasi Hasil Input Data Sektoral pada Portal Jember Satu Data
 Menindaklanjuti Bimtek Inputing Data yang dilaksanakan di Aula PB Sudirman Pemkab Jember, dilanjutkan dengan Evaluasi terhadap data-data sektoral yang masuk pada Portal Jember Satu Data. Rapat Evaluasi ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 di Aula Bawah Pemkab Jember. Data-data yang masuk pada Portal Jember Satu Data untuk mempersiapkan Launching Portal Jember Satu Data yang akan dilaksanakan di Pendopo Wahyawibawa Graha



Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Layanan SPBE

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : Aplikasi Informatika			
	Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			

	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp2.340.086.800	RP2.305.330.578	98,51
	Output : Jumlah sistem jaringan intra Pemerintah Daerah	3 unit	3 unit	100
	Outcome : Dokumen pengelolaan Domain dan Sib Domain yang tersusun	15 dokumen	13 dokumen	86,66
	Kegiatan : Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah			
	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp659.698.900	Rp627.229.500	95,07
	Output : Jumlah pusat data Pemerintahan Daerah yang dikelola	1 unit	1 unit	100
	Outcome : Dokumen pengelolaan E-government yang tersusun	20 dokumen	13 dokumen	86,66
	Sub Kegiatan : Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Berbasis Elektronik			
	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp950.000.000	Rp948.494.000	99,84
	Output : Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan	4 unit	4 unit	100

	Berbasis Elektronik yang di kembangkan			
	Outcome : Dokumen pengelolaan E-government yang tersusun	20 dokumen	13 dokumen	86,66

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pada sub kegiatan ini kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 yaitu :

1. Kegiatan uji coba/trial internet untuk server sebagai induk jaringan intra Kabupaten Jember



2. Penyediaan internet jaringan intra Kabupaten Jember, pada tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan jaringan intra pada 3 Perangkat Daerah dengan 22 titik pemasangan, yaitu :

No	Titik Pemasangan	No	Titik Pemasangan
1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	12	RTH Semanggi
2	Dinas Kesehatan	13	RTH Gajah Mada

3	Dinas Komunikasi dan Informatika	14	Puskesmas Bnajarsengon
4	Kecamatan Arjasa	15	Puskesmas Gladak Pakem
5	Kecamatan Kaliwates	16	Puskesmas Jember Kidul
6	Kecamatan Patrang	17	Puskesmas Kaliwates
7	Kecamatan Sukorambi	18	Puskesmas Mangli
8	Kecamatan Sumpersari	19	Puskesmas Patrang
9	RTH Alun-alun	20	Puskesmas Sumpersari
10	RTH Sumpersari	21	Puskesmas Sukorambi
11	RTH Arjasa	22	Pendopo

Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

Pada sub kegiatan ini kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 yaitu :

1. Pendampingan setting dan konfigurasi server



2. Pemeliharaan dan perbaikan AC di ruang server



3. Perawatan dan perbaikan modul genset untuk server



4. Penggantian bateray UPS server



5. Pemeliharaan server untuk pemasok daya server



6. Penambahan storage SSD pada server sebanyak 8 Tb



7. Selain pemeliharaan dan penambahan storage, untuk kebutuhan keberlangsungan pengelolaan pusat data dilaksanakan juga b Belanja pembayaran jasa IP Transit, Lisensi keamanan server, jasa link BGP Server dan jasa lisensi Google suite.

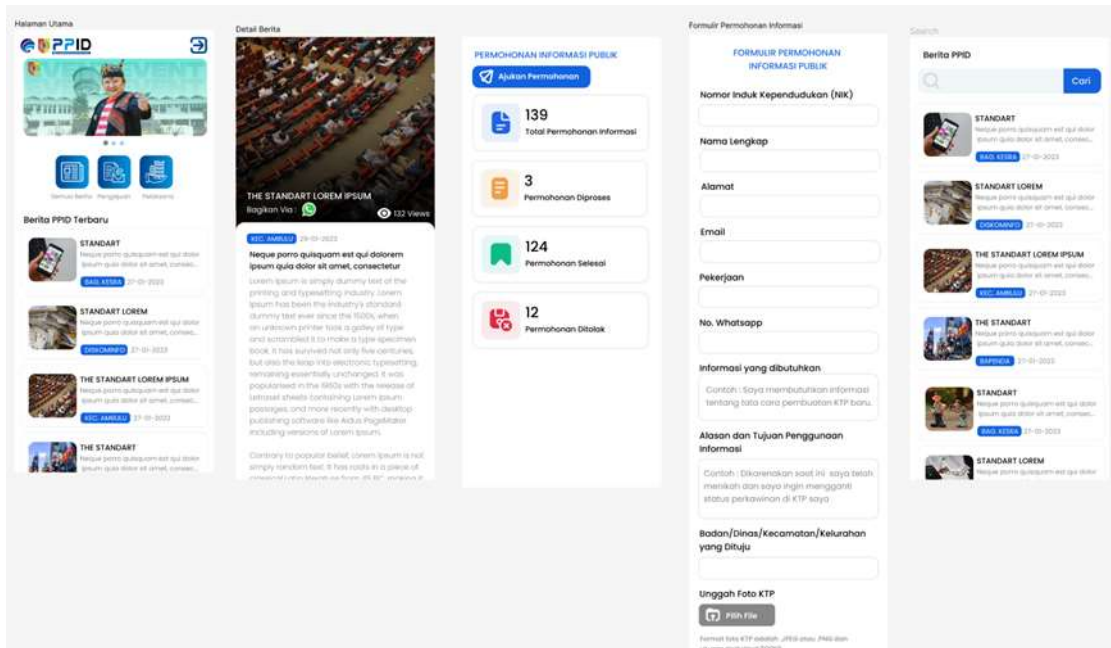
Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Berbasis Elektronik

Pada sub kegiatan ini kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 yaitu :

1. Pembuatan Website Dinas Perpustakaan dan Kearsipan :
<https://dispusip.jemberkab.go.id/>



2. Merancang dan Membangun Aplikasi PPID Kabupaten Jember Berbasis Android
Aplikasi ini dirancang dan dibangun dengan spesifikasi pengguna yaitu dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat. Melalui aplikasi ini masyarakat dapat mengakses berita PPID Kabupaten Jember, mengajukan permohonan informasi, dan melihat profil PPID Pelaksana. Selain itu, disertai fitur khusus untuk admin pengelola untuk memeriksa dan menindaklanjuti adanya permohonan berita maupun permohonan informasi.



3. Input Data Harga BAPOKTING (Bahan Pokok Tinggi) Kabupaten Jember pada Aplikasi J-KOPI.

Data yang input merupakan data terbaru berdasarkan kecamatan dari data harga yang dirilis oleh Disperindag Kabupaten Jember dan dapat akses oleh masyarakat melalui aplikasi J-KOPI pada menu "Harga Bahan Pokok Tinggi".

<https://play.google.com/store/search?q=jember+kota+pintar&c=apps>

Nama Produk	Harga Kemarin	Harga Terkini
Cabai Merah Besar	Rp 85.000	Rp 95.000
Beras B-34 (Premium)	Rp 13.000	Rp 13.000
Bawang Putih	Rp 28.000	Rp 28.000
Cabai Kuning	Rp 85.000	Rp 85.000
Tomat	Rp 4.000	Rp 4.000
Gula Pasir	Rp 18.000	Rp 18.000
Tepung Terigu	Rp 10.000	Rp 10.000
Daging Sapi Merah	Rp 120.000	Rp 120.000
Beras Bengawan (Premium)	Rp 14.000	Rp 14.000
Kentang	Rp 14.000	Rp 14.000
Petur Ayam Ras/ Petelur	Rp 20.000	Rp 20.000

4. Menambah Fitur pada Aplikasi SIKEREN.

- Membuat Menu arsip di bagian Admin OPD untuk menampung data periode kinerja tiap tahunnya dengan otomatis membuat tabel baru
- Menambahkan fitur untuk pemotongan 50% TPP bagi pegawai yang judul jabatannya terdapat kata "penilik"
- Menambahkan fitur untuk pegawai fungsional hasil penyetaraan untuk dapat TPP kelas jabatan 9
- Menambahkan div di bagian menu profil pegawai, dibawah tombol reset password yg berisi perbup pasan 25 ayat 3
- Membuat menu untuk input nama bendahara dan kepala SKPD di rekap tpp
- Membuat filter untuk rekap tpp per satker (sd, paud, smp) dan tombol khusus untuk merekap total tpp di dispendik termasuk lembaganya
- Menambah menu untuk guru yg belum mendapat tunjangan profesi guru, hanya mendapatkan pagu TPP kelas jabatan 1
- Menambah fitur Export Excel di rekap TPP

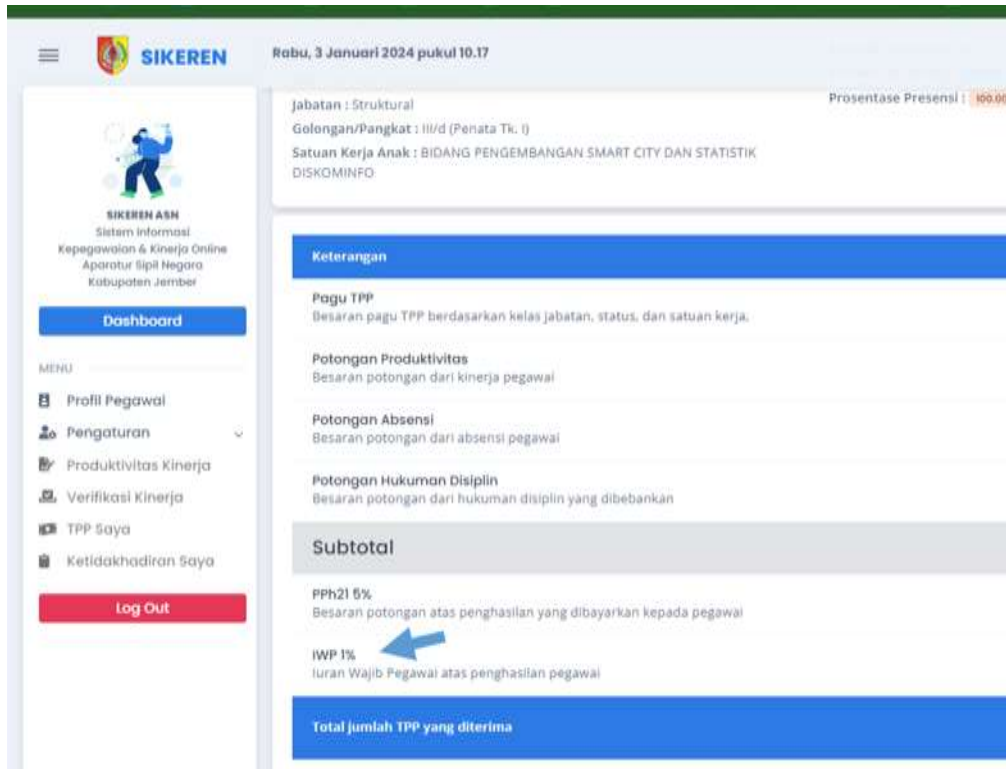
No	Nama	NIP	Golongan	Eselon / jabatan	Kelas jabatan	Pagu TPP	Besaran TPP				Hukumah Disjuti (Rp.)	PNS/PT (No)	Jumlah TPP Kotor	Aksi
							Presensi (Rp.)	Presensi (%)	Kinerja (Rp.)	Kinerja (%)				
1	BERRY ARI SANDI	19770407198121001	AVS	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12	Rp. 12.974.700	Rp. 0	0,0	Rp. 0	100,00	Rp. 0	15	Rp. 17.028.400	Detail
2	HERY LITWAN TORO	198003032003121005	AVS	DLA / SEKRETARAT DISKOMINFO	12	Rp. 8.211.300	Rp. 0	0,0	Rp. 0	100,00	Rp. 0	15	Rp. 9.014.600	Detail
3	H RICHY KRONING	197908272002121006	III/B	KECAMATAN UMBULHARU	12	Rp. 7.198.800	Rp. 0	0,0	Rp. 0	100,00	Rp. 0	5	Rp. 8.828.800	Detail
4	YULITA MAHARANI	198606291989122001	AVS	DLA / BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA DISPORDA	11	Rp. 7.198.800	Rp. 0	0,0	Rp. 0	100,00	Rp. 0	15	Rp. 8.118.800	Detail
5	MARXHU	1979122200501200F	III/B	DLA / BIDANG PENGARAHAN SMART CITY DAN STATISTIK DISKOMINFO	11	Rp. 7.198.800	Rp. 0	0,0	Rp. 0	100,00	Rp. 0	5	Rp. 8.828.800	Detail
6	ARHYA DEWI	198708021988032001	III/B	DLA / BIDANG KALANGAN DAN PERENCANAAN BID KALISAT	11	Rp. 7.198.800	Rp. 0	0,0	Rp. 0	100,00	Rp. 0	5	Rp. 8.828.800	Detail
7	IRA	198811282011012014	III/B	BIDANG ASPRAK DAN LAYANAN	9	Rp. 3.447.100	Rp. 0	0,0	Rp. 0	100,00	Rp. 0	5	Rp. 3.174.700	Detail

5. Penambahan Fitur Perhitungan IWP pada Aplikasi Sikeren Kinerja

<https://sikeren.jemberkab.go.id/>

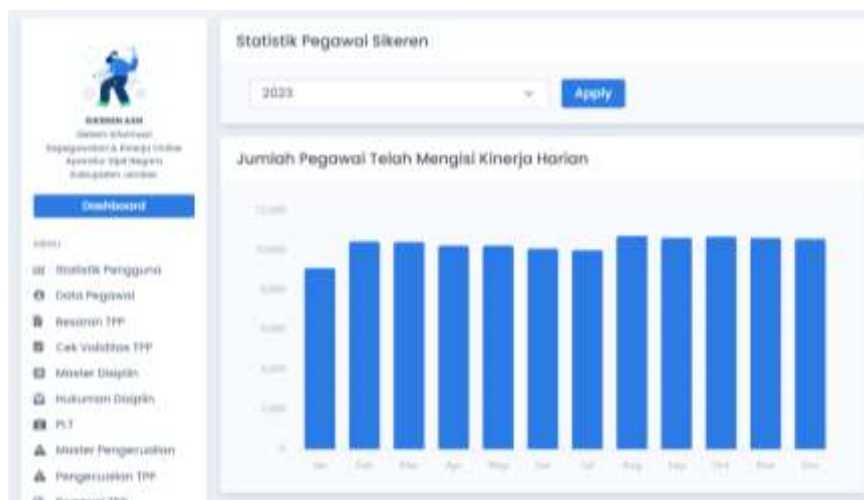
Pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM), serta Bagian Organisasi mengajukan perhitungan IWP untuk diterapkan pada perhitungan TPP. Fitur IWP (Iuran Wajib Pegawai) digunakan untuk memberikan potongan iuran dari penghasilan pegawai yaitu Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 1%.

Proses perhitungan IWP melibatkan perhitungan dari gaji kotor yang datanya diakses langsung melalui API yang disediakan oleh TASPEN.



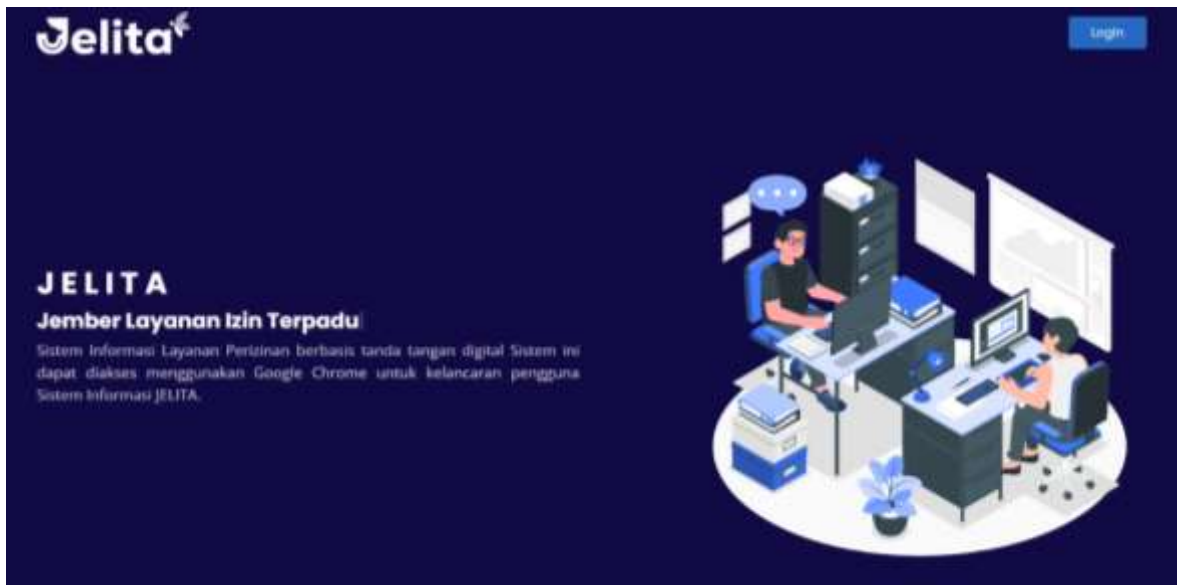
6. Penambahan fitur statistik Data Pegawai

Fitur statistik data pegawai digunakan untuk menampilkan data jumlah pegawai yang telah mengisi kinerja harian dan jumlah pegawai yang telah menghitung TPP setiap bulan. Fitur ini hanya dapat diakses melalui akun BKPSDM.



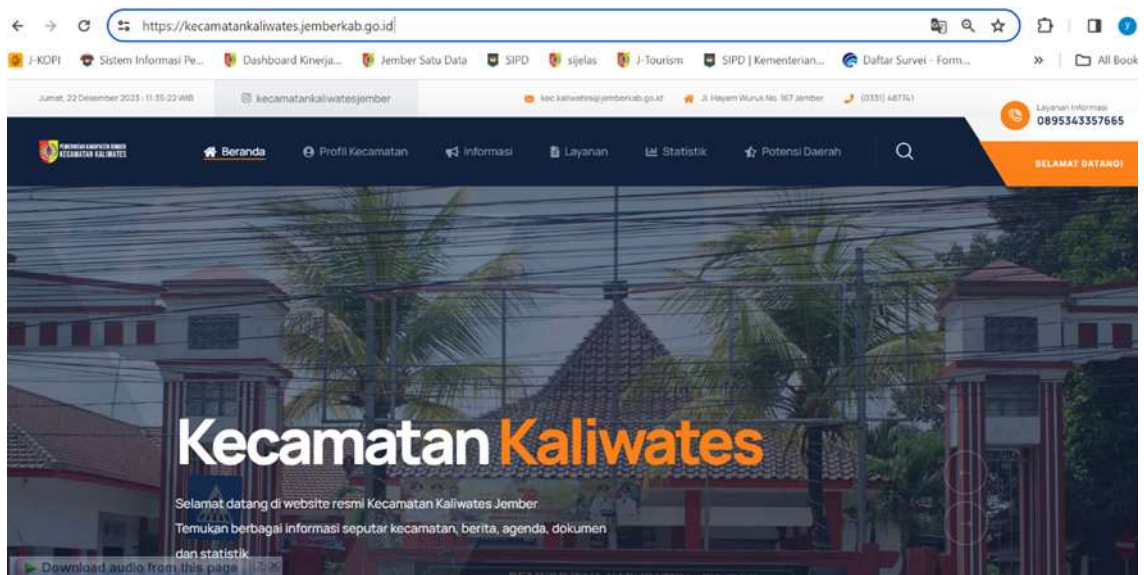
7. Pembuatan Website Sistem Informasi Layanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

<https://jelita-dpmpstp.jemberkab.go.id/login.html>



8. Pembuatan Website Kecamatan Kaliwates

<https://kecamatankaliwates.jemberkab.go.id/>



9. Pembuatan Website Kelurahan Tegalgede

<https://kelurahan-tegalgede.jemberkab.go.id/>



10. Pembuatan Website Mal Pelayanan Publik (MPP) <https://mpp.jemberkab.go.id/>

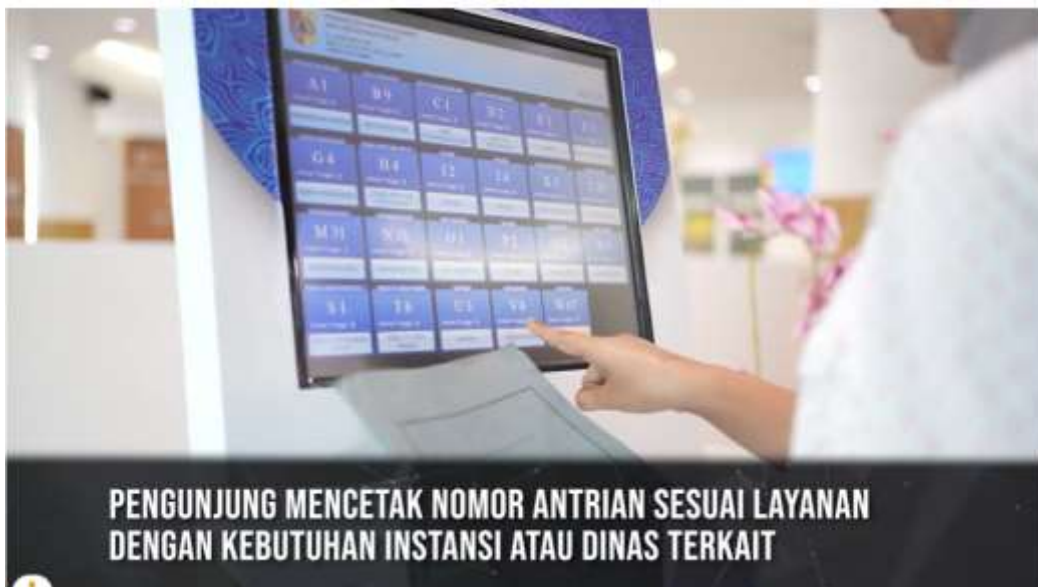


11. Pembuatan Website Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Jember <https://jdih.jemberkab.go.id/>



12. Sistem Antrian Mal Pelayanan Publik (MPP)

Mal Pelayanan Publik yang ada di kabupaten Jember di Launching pada bulan November 2023, untuk itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember membuat Sistem Antrian yang ada di MPP dan juga menyiapkan beberapa Sarana Prasarana yang ada di MPP



13. Pembuatan Website Kecamatan Gumukmas

<https://kecamatan gumukmas.jemberkab.go.id/>



B.4 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2023 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi

Tabel 3.7

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE	87,5	84,63	Efisien / Tidak Efisien
Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	104,7	92,04	Efisien / Tidak Efisien

Meningkatkan penerapan manajemen SPBE	115,3	96,85	Efisien / Tidak Efisien
Meningkatkan kualitas layanan SPBE	122,6	97,80	Efisien / Tidak Efisien

Sumberdaya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika berjumlah 51 (Lima puluh satu) orang dengan rincian 9 (Sembilan) pejabat struktural, 10 (Sepuluh) pejabat fungsional dan 32 (Tiga puluh dua) pelaksana.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian didukung anggaran sebesar **Rp. 23.620.884.583,- dan terserap sebesar Rp. 22.401.285.688,-**

Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dengan rata-rata capaian **107,525%.**

Pada tahun 2023, karena kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Jember, terdapat refocusing anggaran pada P-APBD 2023 di Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp2.061.239.348, antara lain pengurangan pada :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp30.060.718,-.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebesar Rp8.000.000,-.
- c. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya sebesar Rp98.500.000,-.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp2.815.200,-.
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp269.693.000,-.
- f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp340.900,-.
- g. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp7.020.000,-.
- h. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan sebesar Rp36.415.000,-.

- i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp77.544.105,-.
- j. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp1.104.279.000,-.
- k. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp11.520.000,-.
- l. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp198.500,-.
- m. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebesar Rp52.680.000,-.
- n. Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik sebesar Rp18.833.200,-.
- o. Sub Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah sebesar Rp126.958.600,-.
- p. Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik sebesar Rp51.742.000,-.
- q. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik sebesar Rp100.000.000,-.
- r. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik sebesar Rp42.155.800,-.
- s. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas sebesar Rp151.044.800,-.
- t. Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp125.437.300,-.
- u. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.340.000,-.
- v. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebesar Rp395.711.800,-.
- w. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah sebesar Rp382.100,-.

- x. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah sebesar Rp1.742.000,-.
- y. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik sebesar Rp50.000.000,-.
- z. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas sebesar Rp407.821.425,-.
- aa. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Daerah sebesar Rp71.250.000,-.
- bb. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi sebesar Rp16.120.000,-.
- cc. Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektorial sebesar Rp161.480.000,-.
- dd. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp162.075.000,-.
- ee. Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp4.288.000,-.
- ff. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp31.960.900,-.

Namun dari pengurangan tersebut ada sebagian yang digeser/penambahan pada sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp9.510.000,-.
- b. Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media sebesar Rp1.548.660.000,-.

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, pada tahun anggaran 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 23.620.884.583,-. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember. Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp 16.876.643.008,- (71,45%)
2. Belanja Modal sebesar Rp 6.744.241.575,- (28,55%)

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai 5 (Lima) program dan 10 (sepuluh) kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika. dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut :

TABEL 3.9
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.167.291.208	5.769.064.540	93,54
1	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.836.863.214	3.582.282.831	93,36
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.552.063.214	3.297.482.831	92,83
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	284.800.000	284.800.000	100
2	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	49.950.000	99,99
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50.000.000	49.950.000	99,99
3	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	240.410.000	190.897.750	79,40

	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.110.000	1.054.000	94,95
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108.211.000	68.600.000	63,39
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	116.892.500	107.796.750	92,21
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.171.500	12.827.000	97,38
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.025.000	620.000	60,48
4	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.867.654.094	1.785.632.317	95,60
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	391.000	26,06
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.685.094	132.289.065	97,49
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.730.469.000	1.652.952.252	95,52
5	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.363.900	160.301.642	93,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.110.000	55.965.600	97,99
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.300.000	62.301.792	93,96
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.152.400	25.283.250	78,63
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.801.500	16.751.000	99,69

	Program : Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	7.006.158.000	6.630.690.540	94,64
1	Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.006.158.000	6.630.690.540	94,64
	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	9.416.000	8.432.950	89,55
	Sub Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	492.284.600	462.163.110	93,88
	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	125.938.000	86.188.000	68,43
	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	48.320.000	44.909.480	92,94
	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	266.561.200	225.600.000	84,63
	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	5.674.085.000	5.460.902.000	96,24
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	292.737.600	245.995.000	84,03
	Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	96.815.000	96.500.000	99,67
	Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika	10.023.789.375	9.620.148.078	95,97
1	Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.360.626.800	2.315.558.578	98,09
	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.540.000	10.228.000	49,79

	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.340.086.800	2.305.330.578	98,51
2	Kegiatan : Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.663.162.575	7.304.589.500	95,32
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	659.698.900	627.229.500	95,07
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	938.000	0	0
	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	950.000.000	948.494.000	99,84
	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	6052.525.675	5.728.866.000	94,65
	Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral	271.290.000	240.895.530	88,79
1	Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	271.290.000	240.895.530	88,79
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	105.550.000	83.030.530	78,66
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	119.220.000	115.475.000	96,85
	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	46.520.000	42.390.000	91,12
	Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	152.356.000	140.487.000	92,20

1	Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	152.356.000	140.487.000	92,20
	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.020.000	3.830.000	95,27
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.144.000	2.100.000	97,94
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	146.192.000	134.557.000	92,04
	JUMLAH	23.620.884.583	22.401.285.688	94,84

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023 sebesar Rp. 22.401.285.688,00 dari total anggaran Rp. 23.620.884.583,00 atau 94,84%. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2022 maka mengalami kenaikan sebesar 7,34 % yaitu pada tahun 2022 dari total anggaran sebesar Rp. 25.324.573.772,00 terealisasi sebesar Rp 22.178.818.172,00,- atau 87,5%. Kenaikan ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal dan perencanaan penganggaran yang lebih selektif dan sesuai kebutuhan.

Selain Anggaran Belanja, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki target pendapatan melalui retribusi daerah sebagai berikut:

- Retribusi Menara Telekomunikasi

Tabel 3.8
REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2023

No	PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
I	Retribusi Daerah			
	Retribusi Menara Telekomunikasi	540.000.000	2.190.926.880	405,73

Capaian tahun 2023 sebesar 405,73% disebabkan rendahnya target retribusi yang ditetapkan karena pada saat penyusunan RKPD 2023 masih 2 (dua) perusahaan menara telekomunikasi yang membayar retribusi tahun 2022 sehingga target pendapatan disamakan dengan target pada tahun 2022.

Pada tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember tidak menargetkan pendapatan retribusi pengendalian menara telekomunikasi karena berdasarkan

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bab IV Retribusi Daerah Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 60 ayat (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum terdiri atas pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum dan pelayanan pasar.

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak tercantum pada peraturan tersebut. Kewenangan pengendalian menara telekomunikasi diambil alih oleh Pemerintah Pusat.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Dinas Komunikasi dan Informatika. Didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2021-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan Sangat Memuaskan karena dari 4 (Empat) indikator sasaran sebanyak 3 (Tiga) indikator pencapaiannya dalam kategori sangat memuaskan, 1 (Satu) indikator dalam kategori memuaskan.

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2023 sebesar Rp22.401.285.688,00 (94,84%), sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan ada efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran.

B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan. dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Belum tersedianya kebijakan-kebijakan SPBE di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jember yang memuat arah kebijakan SPBE meliputi tata kelola, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan sumber daya manusia.
2. Belum optimalnya Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
3. Belum optimalnya penerapan manajemen SPBE.

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun 2024 dan tahun – tahun berikutnya antara lain :

1. Percepatan penyusunan kebijakan-kebijakan SPBE.
2. Mengoptimalkan kinerja Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dan Kolaborasi Penerapan SPBE.
3. Melakukan inisiatif penerapan manajemen SPBE sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2023 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2024.

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sebelum Perubahan													
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik	Nilai Indeks SPBE			2,19	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60			
			Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Nilai Indeks SPBE	2,19	2,20					Penguatan tata kelola SPBE	- Penguatan dan optimalisasi infrastruktur jaringan TIK - Peningkatan integrasi aplikasi layanan publik	Pengelolaan Aplikasi Informatika
			Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data dan informasi statistik	45,8	50,0					Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral	Penguatan ketersediaan data dan informasi statistik sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral

LAMPIRAN 1

			sektoral untuk perencanaan dan evaluasi										
			Meningkatkan keamanan informasi dalam mendukung SPBE	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan keamanan informasi dalam pelayanan	2,7	11,1					Penguatan keamanan informasi dan persandian	Melaksanakan pembinaan keamanan informasi dan persandian	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Sesudah Perubahan													
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik	Nilai Indeks SPBE			2,19	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60			
			Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE	Nilai indeks Domain Kebijakan SPBE			2,4	2,5	2,6	2,7	Penguatan kebijakan tata kelola SPBE	1. Penyusunan Arsitektur SPBE 2. Penyusunan Peta Rencana SPBE	Program Informasi dan Komunikasi Publik
			Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE			2,1	2,2	2,3	2,4	Penguatan tata kelola SPBE	1. Penguatan Optimalisasi infrastruktur jaringan TIK 2. Penguatan Pusat Data	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
			Meningkatkan penerapan manajemen SPBE	Nilai Indeks Domain Manajemen SPBE			1,5	1,8	2,1	2,4	1. Monitoring dan Evaluasi Manajemen SPBE	1. Penyusunan Laporan Manajemen SPBE	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

LAMPIRAN 1

								2. Penguatan Keamanan Informasi dan Persandian	2. Melaksanakan Audit TIK	
	Meningkatkan kualitas layanan SPBE	Nilai Indeks Domain Layanan SPBE		2,6	2,7	2,8	2,9	Pembangunan Aplikasi SPBE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan INtegrasi Aplikasi Layanan Administrasi Pemerintahan 2. Peningkatan Integrasi Aoplikasi Layanan Publik 	Program Aplikasi Informatika



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. NUSANTARA NO. 2 ☎ (0331) 5102507 JEMBER 68133

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2023**

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE	Nilai Indeks Domain Kebijakan SPBE	2,4	Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	54,80%	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota yang sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100%	7.006.158.000
Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2,1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	100%	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal	100%	152.356.000

Meningkatkan penerapan manajemen manajemen SPBE	Nilai Indeks Domain Manajemen SPBE	1,5	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Buku Kabupaten Dalam Angka	130	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	4	271.290.000
Meningkatkan kualitas layanan SPBE	Nilai Indeks Domain Layanan SPBE	2,6	Aplikasi Informatika	Cakupan Layanan Telekomunikasi	92%	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara	66%	2.360.626.800
						Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	50%	7.663.162.575

Jember, 2023
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

BOBBY ARIE SANDY, S.STP, MM
NIP. 19770307 199612 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. Nusantara Nomor 2 Telp. 0331-5102507 Jember 68133

PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BOBBY ARIE SANDY, S.STP, MM

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 21 November 2023

Pihak Pertama

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

METERAI TEMPEL
04B24AJX521677623

BOBBY ARIE SANDY, S.STP, MM
NIP. 19770307 199612 1 001

PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE	Nilai indeks domain kebijakan SPBE	2,4
2	Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Nilai indeks domain tata kelola SPBE	2,1
3	Meningkatkan penerapan manajemen SPBE	Nilai indeks domain manajemen SPBE	1,5
4	Meningkatkan kualitas layanan SPBE	Nilai indeks domain layanan SPBE	2,6

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.167.291.208	P – APBD
2. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 7.006.158.000	P – APBD
3. Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 10.023.789.375	P – APBD
4. Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 271.290.000	P – APBD
5. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 152.356.000	P – APBD
Jumlah	Rp. 23.620.884.583	



BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.

Jember, 21 November 2023
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,


BOBBY ARIE SANDY, S.STP, MM
 NIP. 197703071996121001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JL. NUSANTARA NO. 2 TELP. (0331) 5102507
J E M B E R

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/128/35.09.323/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi;
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember dalam :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember;

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember
pada tanggal : 08 Mei 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



BOBBY ARIE SANDY, S.STP, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19770307 199612 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember

- Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember
- Tujuan : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
- Tugas : Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika, urusan Pemerintahan dibidang Statistik dan urusan Pemerintahan dibidang Persandian
- Fungsi : a. Merumuskan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Jember, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Kabupaten Jember, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, distaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan system komunikasi intra Pemerintah Kabupaten Jember, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief

- Information Officer (GCIO) Kabupaten Jember, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat lingkup Kabupaten Jember;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Jember, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Kabupaten Jember, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, distaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan system komunikasi intra Pemerintah Kabupaten Jember, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Kabupaten Jember, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat lingkup Kabupaten Jember;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE	Nilai indeks domain kebijakan SPBE	<p>Nilai Indeks domain kebijakan SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB</p> <p>Penjelasan Sesuai Pedoman : Indikator evaluasi domain kebijakan SPBE sesuai PermenpanRB No. 59/2020</p> <p>Penjelasan Nilai Indeks domain kebijakan SPBE : Nilai indeks domain kebijakan SPBE merupakan nilai indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan kapabilitas proses.</p>	Seluruh OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Nilai indeks domain tata kelola SPBE	<p>Nilai Indeks domain tata kelola SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB</p> <p>Penjelasan Sesuai Pedoman : Indikator evaluasi domain tata kelola SPBE sesuai PermenpanRB No. 59/2020</p> <p>Penjelasan Nilai Indeks SPBE : Nilai indeks domain tata kelola SPBE merupakan nilai indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan kapabilitas proses.</p>	Seluruh OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatkan penerapan manajemen SPBE	Nilai indeks domain manajemen SPBE	<p>Nilai Indeks domain manajemen SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB</p> <p>Penjelasan Sesuai Pedoman :</p>	Seluruh OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika

		<p>Indikator evaluasi domain manajemen SPBE sesuai PermenpanRB No. 59/2020</p> <p>Penjelasan Nilai Indeks SPBE : Nilai indeks domain manajemen SPBE merupakan nilai indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan kapabilitas proses.</p>		
Meningkatkan kualitas layanan SPBE	Nilai indeks domain layanan SPBE	<p>Nilai Indeks domain layanan SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB</p> <p>Penjelasan Sesuai Pedoman : Indikator evaluasi domain layanan SPBE sesuai PermenpanRB No. 59/2020</p> <p>Penjelasan Nilai Indeks SPBE : Nilai indeks domain layanan SPBE merupakan nilai indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan kapabilitas layanan.</p>	Seluruh OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika

PRESTASI/PENGHARGAAN

NO	JENIS PRESTASI	LEVEL/TINGKAT	TAHUN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	KI Award mendapat Peringkat 5 sebagai Kabupaten Informatif	Provinsi	2023	Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Jember mendapat Predikat Informatif dari Komisi Informasi Jawa Timur	
2	Kepala Daerah Inovator Peningkatan Ketersediaan Pangan di Jawa Timur	Provinsi	2023	Anugerah Antara Jatim Tahun 2023	

3	Penghargaan Khusus Kategori OPD Terbaik Dalam Partisipasi Pemungutan Retribusi Daerah Tahun 2023	Kabupaten	2023	Jember Tax Award 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Penganugerahan Khusus Bijak Pajak Kabupaten Jember diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada insan dan badan/lembaga/institusi yang menjadi kolaborator dalam mensukseskan pembangunan daerah	
4	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Provinsi	2023	Penghargaan Anugerah Program Ekonomi Terpuji dalam kategori Pengembangan Ekonomi Kreatif dari Detik Jatim Award	